

**DOKUMEN
RENCANA KERJA
(RENJA)**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya Dokumen Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 2024.

Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tembilahan, Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian Dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir



Trio Beni Putra, SE, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19751126 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	18
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	63
3.3 Program dan Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	90
BAB V PENUTUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2019-2023, sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah otonom baru. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Maka, Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 berpedoman pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan

- Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024
- Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2022, pengendalian kegiatan tahun 2023 , dan RKPD 2024)

2) Penyusunan Rancangan Awal

- Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan pengampu kepentingan.
- Desk dengan pengampu kegiatan

3) Penyusunan Rancangan

- Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024
- Masukan dari pelaksana kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

- Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi , dan Pemangku Kepentingan yang terkait lainnya.

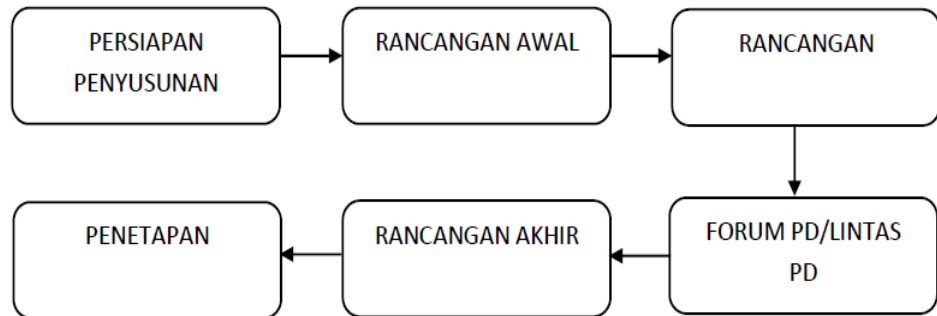
5) Perumusan Rancangan Akhir

- Penyempurnaan Dokumen

6) Penetapan

GAMBAR 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir



Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
- 2) Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4421); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
32. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
33. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian
35. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
36. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Sandiman;
37. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
39. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

41. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;
42. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
43. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
44. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
45. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja-PD) adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahunan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- untuk memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan Perangkat Daerah;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perangkat Daerah;
- Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah; dan
- Sebagai instrument untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara sistematis yang berisikan antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat

Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Lampirkan Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian NSPK dan SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir,
 - Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidan pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang merupakan Renja Tahun keempat dalam periode Renstra 2018-2023, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian Tabel II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2023) mencantumkan program dan kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2024 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (7+10+target 2024 manual)	(6)	(7)	(8)	(9 = 8/7*100)	(10)	(11 = 6 + 8 + 10)	(12 = 11/5*100)
2.016.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.016.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persen	100		100	95,85	95,85	100	97,93	97,9
2.016.01.02.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Persen	93,33		90	90	100	100	95	102

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)		Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 1.02.01 .06		1.1 .1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21		7	7	100	7	14	66,67
2.016.0 1.02.02	2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar	Persen	100		100	98	98	100	100	99	99
2.016.0 1.02.02 .01		2.1 .1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	90		30	29	96,67	30	59	66
2.016.0 1.02.02 .05		2.1 .2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67
2.016.0 1.02.03	3.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara	Persen	100		100	100	100	100	100	100	100
2.016.0 1.02.03 .02		3.1 .1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	9		3	3	100	3	6	66,67
2.016.0 1.02.05	4.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	100		100	100	0	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 1.02.05 .02		4.1 .1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60		0	0	0	30	30	50,00
2.016.0 1.02.05 .09		4.1 .2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9		2	2	0	3	5	55,56
2.016.0 1.02.06	5.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	100		100	91	91	100	95,5	96
2.016.0 1.02.06 .01		5.1 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9		3	3	100	3	6	66,67
2.016.0 1.02.06 .02		5.1 .2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	78		62	62	100	8	70	89,74
2.016.0 1.02.06 .04		5.1 .3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8		4	4	100	2	6	75,00
2.016.0 1.02.06 .05		5.1 .4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10		6	6	100	2	8	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 1.02.06 .06		5.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	850		350	342	97,71	250	592	69,65
2.016.0 1.02.06 .09		5.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250		100	90	90,0	75	165	66,00
2.016.0 1.02.08	6.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	100		100	83	83	100	91,5	92
2.016.0 1.02.08 .01		6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60		20	20	100	20	40	66,67
2.016.0 1.02.08 .02		6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10		2	2	100	4	6	60,00
2.016.0 1.02.08 .04		6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36		12	12	100	12	24	66,67
2.016.0 1.02.09	7.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Persen	100,00		100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 1.02.09 .02		7.1 .1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10		3	3	100	3	6	60,00
2.016.0 1.02.09 .09		7.1 .2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		0	0	0	2	2	50,00
2.016.0 1.02.09 .011		7.1 .3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300		100	100	100	100	200	66,67
2.016.0 2	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	88,33		65	62	95,4	100	81	91,7
2.016.0 2.02.01		2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan	Persen	100		100	95	95,00	100	97,5	98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 2.02.01 .04		2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	85		45	45	100	20	65	76,47
2.016.0 2.02.01 .05		2.1	Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	243		83	83	100	80	163	67,08
2.016.0 2.02.01 .06		2.1	Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	60		20	20	100	20	40	66,67
2.016.0 2.02.01 .012		2.1	Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	15		5	4	80	5	9	60,00
2.016.0 3	3	Program Aplikasi Informatika		Persentase Jumlah Aplikasi PD yang jaringan Aplikasinya di awasi oleh Dinas Kominfo Pers Kab.Inhil	Persen	96,67		90	90	100	100	95	98,3
				Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen	96,67		90	90	100	100	95	98,3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 3.02.01	3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah Sub Domain lingkup pmda yang dikelola	Persen	93		90	90	100	90	90	96
2.016.0 3.02.01 .01	3.1 .1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	58		30	30	0	14	44	75,86
2.016.0 3.02.01 .02	3.1 .2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	44		30	30	100	7	37	84,09
2.016.0 3.02.01 .03	3.1 .3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	10		0	0	0	5	5	50,00
2.016.0 3.02.02	3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi	Persen	65,00		90	90	100	100	95	48,57

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 3.02.02 .01		3.2 .1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3		1	1	100	1	2	66,67
2.016.0 3.02.02 .03		3.2 .2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	6		2	2	100	2	4	66,67
2.016.0 3.02.02 .07		3.2 .3	Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	11		3	2	66,67	4	6	54,55
2.016.0 3.02.02 .08		3.2 .4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	6		0	0	0	3	3	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.016.0 3.02.02 .010		3.2 .5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	3		1	1	0	1	2	66,67
2.016.0 3.02.02 .012		3.2 .6	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	6		2	2	100	2	4	66,67
2.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2.020.0 2	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah yg Tepat Waktu	Persen	100		100	100		100	100	100,0
2.020.0 2.02.01	4,1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	100		100	100		100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.020.0 2.02.01 .01		4.1 .1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	125		55	55	100	35	90	72,00
2.021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2.021.0 2	5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase PD yang Menggunakan Sistem Persandian	Persen	76,67		30	30	100	100	65,00	84,8
2.021.0 2.02.01		5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sistem Persandian	Persen	76,67		30	30	100	100	65	85
2.021.0 2.02.01 .03		5.1 .1	Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	6		2	2	100	2	4	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Teralokasinya anggaran yang memadai, semangat dan etos kerja											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Koordinasi yang kurang baik dan maksimal dalam permintaan data , terjadi turun naik tagihan listrik dan internet setiap bulan, kurangnya staf ASN, terbatasnya SDM IT, Masih terbatasnya operasional penunjang kegiatan											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : Koordinasi yang baik dalam permintaan data, adanya staf ASN, SDM IT dan terpenuhinya operasional penunjang kegiatan											

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja diatas bahwa capaian program dan kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang Direncanakan, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Program Aplikasi Informatika
 - 1) Kegiatan Pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- c. Program Aplikasi Informatika
- 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
 - a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu:
 - Adanya target kinerja pada RKPD tidak sesuai dengan target pada DPA Perubahan sehingga realisasi tidak mencapai RKPD karena target di RKPD lebih besar.

- Koordinasi yang kurang baik dan maksimal dalam permintaan data
 - Kurangnya staf ASN, terbatasnya SDM IT
 - Tebatasnya operasional pendukung kinerja kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD antara lain:
- Adanya program/kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan karna ketidaksesuaian target kinerja
 - Kurang maksimalnya data dalam pencapaian program Renstra PD
 - Terbatasnya kinerja OPD dalam memecahkan permasalahan
 - Pekerjaan jadi kurang efektif karna operasional pendukung kinerja kegiatan terbatas
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
- Membuat regulasi / SOP setiap tahunnya
 - Membuat Perencanaan kerja yang baik
 - Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian.
 - Mempercepat proses pengajuan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - Mengoptimalkan peran kontrol internal agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 - Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi terkait maupun stakeholders dalam mensinkronkan dan menyelaraskan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui

- Terpenuhinya SDM IT
- Terpenuhinya operasional penunjang kinerja kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya bergabung pada Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sejak tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2016 Akhir berdiri sendiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV menjadi OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Komunikasi dan informatika yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DiskominfoPers, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DiskominfoPers kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024-2026.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika

Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RKPD, maka secara rinci indikator kinerja dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE)			2,08	2,09	2,30	2,50	2,24	2,13	3,0	2,3	
2	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)			100	100	-	-	100	100	100	-	
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)			100	100	-	-	92		100	-	
4	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka" (judul)			1	1	-	-	1	1	1	-	
5	Kecamatan Dalam Angka (Judul)			20	20	-	-	20	20	20	-	
6	Nilai			97	97	-	-	80				

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Keterbukaan Informasi											
7	Cakupan Perangkat Daerah yang menerapkan administrasi pemerintahan secara elektronik			11,76	17,65	-	-	2,94				
8	Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfo			B	B	-	-	CC				
9	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit			23	24	-	-	-				
10	Nilai AKIP Diskominfo			65	70	-	-	62				
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					100	100	-	-	-	100	
12	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian					50	75	-	-	-	50	

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Statistik											
13	Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi					100	100	-	-	-	100	
14	Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah					37	74	-	-	-	37	

Berdasarkan tabel diatas, Indikator yang di masukkan dalam tabel adalah indikator makro dan indikator kinerja utama Dinas Kominfo Pers Kab.Inhil. untuk target indikator makro pada tahun 2024 dan 2026 tidak diisi karena data nya belum didapatkan. Kemudian untuk tedapat IKU lama (sesuai Renstra 2018-2023) dan IKU baru (sesuai Rancangan RPD Renstra 2024-2026). Pada indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE) tahun 2021 sebesar 2,24 karna memakai penilaian mandiri dan belum mendapat nilai dari Kementrian. Untuk target tahun 2023 lebih besar yakni 3,0 dikarenakan menyesuaikan dengan RPJMD sedangkan tahun 2024 s/d 2026 sudah disesuaikan dengan Rancangan RPD/Renstra terbaru.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah

melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir dengan Fokus pada tujuan SKPD yaitu:

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir antara lain;

- 1) Membangun Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengkonsolidasikan seluruh perangkat TIK di tiap-tiap SKPD sampai ke Desa/Kelurahan
- 2) Memberikan pelatihan / sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang pentingnya SPBE di terapkan di setiap SKPD
- 3) Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemkab Inhil dan SKPD
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat
- 5) Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi dan informatika

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antrara lain;

- Permasalahan:
 - 1) Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
 - 2) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum merata di semua wilayah.
 - 3) Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pelayanan publik.
- Hambatan:
 - 1) Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
 - 2) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum merata di semua wilayah.

- 3) Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pelayanan publik.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs antara lain;**
- 1) Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
 - 2) Kurang optimalnya peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan
 - 3) Kurang optimalnya penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain;**
- 1). Tantangan:
 - Globalisasi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
 - Kesenjangan informasi dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat.
 - Belum optimalnya pengelolaan informasi komunikasi publik.
 - Belum optimalnya pengelolaan analisa informasi komunikasi publik dan pengelolaan opini aspirasi publik.
 - Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan website Perangkat Daerah, PPID dan Media Center secara terintegrasi, menyeluruh dan dinamis.
 - Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - Ketersediaan Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata.
 - Distribusi dan integrasi aplikasi dalam menerapkan E-government menuju optimalisasi interoperabilitas.
 - Minimnya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum.
 - Kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

- Belum adanya *Disaster Recovery Plan* dan Jaminan keamanan sistem informasi pada instansi Pemerintah.
- Penyediaan data daerah dan statistik sektoral yang akurat dan akuntabel belum optimal.

2). Peluang

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan TIK.
- Regulasi/peraturan perundangan yang mendukung pengembangan komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan *Open Source*.
- Ditetapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
- Ditetapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Permandagri Nomor 98 Tahun 2018 sebagai landasan pengelolaan *Big Data*.
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses pelayanan.
- Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada di masyarakat dan partisipasi pemanfaatannya.
- Berkembangnya Lembaga atau institusi pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika.
- Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk didayagunakan.
- Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penerapan fungsi *Government Public Relation* (GPR).
- Kebutuhan penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri.

- Penyelenggaraan persandian berbasis TIK untuk keamanan Informasi.
- Sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah.
- Komitmen semua unsur dalam Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas.

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas agar pencapaian tujuan lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota *Smart City*

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kota *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Indragiri Hilir memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2) Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Terintegrasi

Kabupaten Indragiri Hilir seoptimal mungkin melaksanakan pelayanan yang dapat difasilitasi dan terintegrasi dalam mendukung program pemerintah yang berbasis elektronik sesuai dengan dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

3) Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang Berbasis Data

Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4) Pelaksanaan dan Penerapan Sistem SPBE

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari beberapa urusan wajib. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE. yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

5) Keterbukaan Informasi Publik

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

6) *Information Technology for Society*

Masyarakat dan lingkungan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa manusia dan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antar sesama. Dengan adanya perubahan zaman dan kemajuan teknologi telah mampu merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern dan teknologi yang semakin pesat memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa dibatasi oleh jarak dan geografis, selain itu masyarakat mampu memanfaatkan informasi yang saat ini sudah menyebar dan terbukanya informasi secara global serta mengkolaborasikannya dengan memanfaatkan teknologi untuk menunjang kebutuhan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dan keagamaan. Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan dan perkembangan teknologi digital dengan melakukan literasi digital ke masyarakat agar tidak terjebak ketika memilah dan memilih informasi, kemudian melakukan pencegahan terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, RKPD Kabupaten Indragiri Hilir akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, RKPD Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama.

Pagu yang terdapat dalam rancangan Akhir RKPD tahun 2024 sebesar **Rp.29.779.827.069,-** sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Indragiri Hilir

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	6.999.440.231,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	6.999.440.231,00	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	245.957.020,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	245.957.020,00	
a)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	153.978.070,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	153.978.070,00	
b)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	52.359.070,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	52.359.070,00	
c)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	39.619.880,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	39.619.880,00	
2.	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat	Tembilahan Kabupaten	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	100 Persen	4.083.143.000,00	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat	Tembilahan Kabupaten	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	100 Persen	4.083.143.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	daerah	Indragiri Hilir				daerah	Indragiri Hilir				
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.074.909.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.074.909.000,00	
b)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.200.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.200.000,00	
c)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.034.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.034.000,00	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	100 Persen	36.794.400,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	100 Persen	36.794.400,00	
a)	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.794.400,00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.794.400,00	
4.	Kegiatan Administrasi	Tembilahan Kabupaten	Persentase aparatur	100 Persen	45.850.000,00	Kegiatan Administrasi	Tembilahan Kabupaten	Persentase aparatur	100 Persen	45.850.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepegawaian Perangkat Daerah	Indragiri Hilir	yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan yang berkinerja baik			Kepegawaian Perangkat Daerah	Indragiri Hilir	yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan yang berkinerja baik			
a)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25.000.000,00	
b)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	20.850.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	20.850.000,00	
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	735.729.171,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	735.729.171,00	
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.965,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.965,00	
b)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	199.998.306,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	199.998.306,00	
c)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	9.999.900,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	9.999.900,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Hilir	Disediakan			Rumah Tangga	Hilir	Disediakan			
d)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	99.040.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	99.040.000,00	
e)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	
f)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	250 Dokumen	18.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	250 Dokumen	18.000.000,00	
g)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Laporan	388.691.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Laporan	388.691.000,00	
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	100 Persen	124.056.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	100 Persen	124.056.000,00	
a)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	71.376.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	71.376.000,00	
b)	Sub Kegiatan Pengadaan	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	38.780.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	38.780.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indragiri Hilir	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indragiri Hilir	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
c)	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.900.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.900.000,00	
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	1.618.164.240,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	1.618.164.240,00	
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	
b)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	216.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	216.000.000,00	
c)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.400.964.240,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.400.964.240,00	
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara	100 Persen	109.746.400,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan	100 Persen	109.746.400,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dengan baik			Daerah		baik			
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.705.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.705.200,00	
b)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.739.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.739.200,00	
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.292.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.292.000,00	
d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	19.010.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	19.010.000,00	
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	100 Persen	19.503.875.070,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	100 Persen	19.503.875.070,00	
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Persentase informasi dan komunikasi	100 Persen	19.503.875.070,00	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Persentase informasi dan komunikasi	100 Persen	19.503.875.070,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hilir	publik yang tersampaikan			Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hilir	publik yang tersampaikan			
a)	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	197 Dokumen	4.987.328,00	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	197 Dokumen	4.987.328,00	
b)	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20 Dokumen	5.040.000,00	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20 Dokumen	5.040.000,00	
c)	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	1.600.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	1.600.000.000,00	
d)	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	75 Dokumen	17.461.853.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	75 Dokumen	17.461.853.000,00	
f)	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	149.999.000,00	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	149.999.000,00	
g)	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	19.980.000,00	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	19.980.000,00	
h)	Sub Kegiatan Penguatan	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Sumber Daya	10 Orang	12.000.250,00	Sub Kegiatan Penguatan	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Sumber Daya	10 Orang	12.000.250,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Indragiri Hilir	Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Indragiri Hilir	Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			
i)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	150.021.900,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	150.021.900,00	
j)	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	99.993.592,00	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	99.993.592,00	
C.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil	74 Persen	2.434.493.768,00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil	74 Persen	2.434.493.768,00	
		Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK	50 Persen			Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK	50 Persen		
1.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang di kelola	100 Persen	612.999.887,00	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang di kelola	100 Persen	612.999.887,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
a)	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	50.000.000,00	
b)	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	363.000.044,00	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	363.000.044,00	
c)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	17 Unit	199.999.843,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	17 Unit	199.999.843,00	
2.	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90 Porsen	1.821.493.881,00	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90 Porsen	1.821.493.881,00	
a)	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b)	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	30.000.000,00	
c)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	50.000.000,00	
d)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.081.493.975,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.081.493.975,00	
e)	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	30.000.000,00	
f)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	50.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	50.000.000,00	
h)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Master plan Smart City	5 Dokumen	250.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Master plan Smart City	5 Dokumen	250.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kota Cerdas					
i)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	149.999.906,00	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	149.999.906,00	
j)	Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2 Dokumen	30.000.000,00	
k)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	100.000.000,00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	100.000.000,00	
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase dokumen data statistic daerah yang tepat waktu	100 Persen	394.299.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase dokumen data statistic daerah yang tepat waktu	100 Persen	394.299.000,00	
I.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 Persen	394.299.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 Persen	394.299.000,00	
a)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	242.259.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Tembilahan Kabupaten Indragiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	242.259.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Hilir	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Hilir	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
b)	Sub Kegiatan meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5 Orang	50.000.000,00	Sub Kegiatan meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5 Orang	50.000.000,00	
c)	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	25 Dokumen	50.000.000,00	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	25 Dokumen	50.000.000,00	
d)	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	52.040.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	52.040.000,00	
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terciptanya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	37 Persen	447.719.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase terciptanya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	37 Persen	447.719.000,00	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	100 Persen	447.719.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	100 Persen	447.719.000,00	
a)	Sub Kegiatan Penetapan	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Kebijakan Tata	1 Dokumen	10.000.000,00	Sub Kegiatan Penetapan	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Kebijakan Tata	1 Dokumen	10.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indragiri Hilir	Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indragiri Hilir	Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
b)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	
c)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	357.719.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	357.719.000,00	
d)	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	60.000.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	60.000.000,00	
e)	Sub Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	100 Persen	10.000.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	100 Persen	10.000.000,00	
f)	Sub Kegiatan	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Perangkat	1 Perangkat	10.000.000,00	Operasionalisasi Jaring	Tembilahan Kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah	1 Perangkat	10.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indragiri Hilir	Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Daerah		Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indragiri Hilir	yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Daerah		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hal ini berguna untuk menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan kepentingan terkait pelayanan OPD. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Musrenbang 2023 tahun ini dilakukan secara hibrid (langsung ke Kecamatan terkait atau daring melalui *zoom meeting*). Dinas Kominfo Pers Kab.Inhil masih mengikuti secara daring. Pada saat pelaksanaan Musenbang tingkat kecamatan ada beberapa usulan yang diberikan oleh kecamatan. Usulan tersebut disambut baik dan dianalisis kembali serta akan dipertimbangkan kelayakannya oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk dimasukkan kedalam anggaran tahun 2024. Pada saat perintah pelaksanaan penginputan Renja 2024 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mana terlebih dahulu dilakukan verifikasi usulan masyarakat yang diusulkan oleh perangkat desa atau kelurahan dan diverifikasi lewat akun Esselon IV OPD. Ketika dipantau setiap harinya lewat akun Esselon IV

terdapat banyak usulan yang diusulkan oleh Kecamatan/Desa. Akan tetapi semua usulan yang sampaikan tidak sesuai dengan tupoksi dan wewenang Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir seperti Permohonan Pembangunan Tower, Bantuan Pengadaan CCTV, Pengadaan WIFI dll. Maka dari itu, usulan tersebut tidak bisa diterima oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (NIHIL).

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir
Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah RKP tahun terakhir pelaksanaan RPJMN IV (2020-2024), memuat program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang bersifat multiyear atau on-going, memuat program yang menjadi pijakan kokoh untuk memudahkan pekerjaan Pemerintah selanjutnya, yang mendapat mandat untuk memimpin Indonesia.

Adapun arah kebijakan dan prioritas strategi RPJMN 2020-2024 Bidang Komunikasi adalah Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui strategi :

- a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik.
- b. Penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyarakat.
- c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T.
- d. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
- e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital.
- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya.
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis.
- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Adapun Tema RKP Tahun 2024 adalah :

“peningkatan SDM dalam pertumbuhan berkualitas.”

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbagun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan bedaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan, Tema RKP Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 adalah "*Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berbasis Implementasi Kesejahteraan Masyarakat*" Adapun prioritas pembangunan pada Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 antara lain:

1. Pemerataan kualitas layanan kesehatan
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
3. Optimalisasi Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
4. Pengembangan perkebunan kelapa rakyat
5. Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan
6. Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah

7. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah

Untuk sinergitas program dan kegiatan pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik pada tahun 2024, disusunlah rencana kerja tahunan yang bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Tujuan dan Sasaran Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-		
				2024	2025	2026
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Indeks	2.30	2.50	3.00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik Dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Persen	50	75	100
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	37	74	100

Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika		Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kab.Inhil atas Komponen Pengungkit	Nilai	20	20.5	21
Persandian dan Statistik Kab.Inhil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Inhil	Nilai AKIP Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kab.Inhil	Prediket	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Untuk itu pada pembahasan bab 3.3 ini akan dijelaskan apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika ada rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan akhir yakni sebagai berikut:

a. Faktor yang menjadi Pertimbangan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
- Mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;

b. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 sesuai dengan Rancangan Rensta Tahun 2024-2026 berjumlah sebanyak 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan yang masing-masing kegiatan lokasinya ditujukan dan fokus terhadap Kota Tembilahan, Indragiri Hilir dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu sebesar Rp.6.999.440.231,00 dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.245.957.020,00
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 4.083.143.000,00
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 36.794.400,00
 - Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 45.850.000,00
 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.735.729.171,00
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp.124.056.000,00
 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.618.164.240,00
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 109.746.400,00

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki pagu sebesar Rp. 19.503.875.070,00 dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.19.503.875.070,00
 - Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - Sub kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Aplikasi Informatika memiliki pagu sebesar Rp.2.434.493.768,00 dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 612.999.887,00
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.1.821.493.881,00
 - Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki pagu sebesar Rp. 394.299.000,00 dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.394.299.000,00
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor
 - Sub kegiatan Pengembangan Infrastruktur
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki pagu sebesar Rp.447.719.000,00 dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.437.719.000,00
 - Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.10.000.000,00
 - Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK						29.779.827.069,00						11.460.764.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					29.779.827.069,00							11.460.764.000,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					28.937.809.069,00							10.725.374.000,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%			100 Persen	6.999.440.231,00						100%	5.655.361.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100Persen			100 Persen	245.957.020,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	77.758.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen			6 Dokumen	153.978.070,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3 Dokumen	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan			4 Laporan	52.359.070,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	4 Laporan	22.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan			2 Laporan	39.619.880,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2 Laporan	11.108.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar</i>	100Persen			100 Persen	4.083.143.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	4.363.882.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

	2.16.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	30 Orang/bulan			30 Orang/bulan	4.074.909.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	30 Orang/bulan	4.360.152.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	1 Dokumen	399.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	7.034.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	1 Laporan	3.331.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara</i>	100Persen			100 Persen	36.794.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	8.441.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	36.794.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	1 Dokumen	8.441.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pengembangan Kompetensi dan yang Berkinerja Baik</i>	100Persen			100 Persen	45.850.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	33.324.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	30 Paket			25 Paket	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	30 Paket	11.108.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang			3 Orang	20.850.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	3 Orang	22.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik</i>	100Persen			100 Persen	735.729.171,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	326.590.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	4.999.965,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1 Paket	4.442.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	199.998.306,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2 Paket	111.086.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	9.999.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1 Paket	11.108.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	99.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	2 Paket	33.326.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	1 Paket	22.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	250 Dokumen			250 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	250 Dokumen	11.108.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	75 Laporan			82 Laporan	388.691.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	75 Laporan	133.304.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>	100Persen			100 Persen	124.056.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	355.476.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	10 Unit			2 Unit	71.376.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	5 Unit	199.956.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	8 Unit			1 Unit	38.780.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	4 Unit	111.086.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	13.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	1 Unit	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</i>	100Persen			100 Persen	1.618.164.240,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	401.024.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1 Laporan	1.110.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan			2 Laporan	216.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2 Laporan	66.652.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	1.400.964.240,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1 Laporan	333.262.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik</i>	100Persen			100 Persen	109.746.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	100Persen	88.866.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit			2 Unit	11.705.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2 Unit	11.108.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit			3 Unit	19.739.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3 Unit	22.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	59.292.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1 Unit	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit			3 Unit	19.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	3 Unit	11.108.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi</i>	100%			100 Persen	19.503.875.070,00						100%	3.348.168.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan</i>	100Persen			100 Persen	19.503.875.070,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	100Persen	3.348.168.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</i>	197 Dokumen			197 Dokumen	4.987.328,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	197 Dokumen	4.442.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	20 Dokumen			20 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	20 Dokumen	11.108.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

	2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	5 Dokumen			8 Dokumen	1.600.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	5 Dokumen	222.174.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	80 Dokumen			75 Dokumen	17.461.853.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	80 Dokumen	2.666.099.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.006	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	149.999.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	88.869.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	20 Dokumen			1 Dokumen	19.980.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	7 Dokumen	66.652.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	50 Orang			10 Orang	12.000.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	20 Orang	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	150.021.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	2 Dokumen	133.304.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	27 Unit			5 Unit	99.993.592,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	9 Unit	111.086.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Persentase Jumlah Aplikasi PD yang Jaringan Aplikasinya Diawasi oleh Dinas Kominfo pers kab.Inhil</i>	100% 100%			74 Persen	2.434.493.768,00						75% 92%	1.721.845.000,00	

2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Jumlah Sub Domain Lingkup Pemda yang Dikelola</i>	100Persen			100 Persen	612.999.887,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	100Persen	533.218.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.01.001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	10 Domain			3 Domain	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	10 Domain	55.543.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.01.002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen			3 Dokumen	363.000.044,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	5 Dokumen	144.413.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.01.003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
		<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	54 Unit			17 Unit	199.999.843,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	18 Unit	333.262.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang Telah Terintegrasi</i>	90Persen			90 Persen	1.821.493.881,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	90Persen	1.188.627.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	3 Dokumen	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
		<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	2 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	2 Unit	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	1.081.493.975,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	444.349.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	3 Unit			2 Unit	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	3 Unit	55.543.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	3 Layanan			2 Layanan	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	3 Layanan	111.086.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														
			<i>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	5 Dokumen	55.543.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	149.999.906,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	244.392.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)															
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	9 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	9 Dokumen	55.543.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE															
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	2 Dokumen	88.869.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					394.299.000,00							344.368.000,00		
1,	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	100%			100 Persen	394.299.000,00						100%	344.368.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia	100Persen			100 Persen	394.299.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	100Persen	344.368.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen			1 Dokumen	242.259.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	222.174.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 Orang			5 Orang	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	20 Orang	33.326.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														

			<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>	100 Dokumen			25 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	100 Dokumen	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.005	Pembangunan Infrastruktur														
			<i>Jumlah Infrastruktur Statistik</i>	3 Unit			1 Unit	52.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	3 Unit	44.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						447.719.000,00							391.022.000,00	
1,	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase Terciptanya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	100%			37 Porsen	447.719.000,00						74%	391.022.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sistem Persandian</i>	100Porsen			100 Porsen	437.719.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah	100Porsen	368.806.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	13.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah	3 Laporan	22.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	1 Laporan			1 Laporan	357.719.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah	1 Laporan	222.174.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	35 Perangkat Daerah			5 Perangkat Daerah	60.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah	15 Perangkat Daerah	111.086.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Ketersediaan Pengamanan Informasi dan Terselenggaranya Komunikasi yang Aman antar Entitas Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam Jaringan Komunikasi Sandi</i>	100Persen			100 Persen	10.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah	100Persen	22.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi</i>	34 Perangkat Daerah			1 Perangkat Daerah	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah	13 Perangkat Daerah	22.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
J U M L A H							29.779.827.069,00							11.460.764.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kompetensi dan yang berkinerja baik	Tembilahan Kota		
2.	16. 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	25 Paket 25.000.000,00
2.	16. 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Orang 20.850.000,00
2.	16. 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen 735.729.171,00
2.	16. 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket 4.999.965,00
2.	16. 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Paket 199.998.306,00
2.	16. 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket 9.999.900,00
2.	16. 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Paket 99.040.000,00
2.	16. 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket 15.000.000,00
2.	16. 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	250 Dokumen 18.000.000,00
2.	16. 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	82 Laporan 388.691.000,00
2.	16. 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen 124.056.000,00
2.	16. 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Unit 71.376.000,00
2.	16. 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit 38.780.000,00
2.	16. 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit 13.900.000,00
2.	16. 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen 1.618.164.240,00
2.	16. 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan 1.200.000,00
2.	16. 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Laporan 216.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	16.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	1.400.964.240,00
2.	16.	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	109.746.400,00
2.	16.	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Unit	11.705.200,00
2.	16.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Unit	19.739.200,00
2.	16.	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit	59.292.000,00
2.	16.	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Unit	19.010.000,00
2.	16.	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	19.503.875.070,00
2.	16.	02.	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	19.503.875.070,00
2.	16.	02.	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	197 Dokumen	4.987.328,00
2.	16.	02.	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	20 Dokumen	5.040.000,00
2.	16.	02.	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	8 Dokumen	1.600.000.000,00
2.	16.	02.	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	75 Dokumen	17.461.853.000,00
2.	16.	02.	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	149.999.000,00
2.	16.	02.	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	19.980.000,00
2.	16.	02.	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	10 Orang	12.000.250,00
2.	16.	02.	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Dokumen	150.021.900,00
2.	16.	02.	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	5 Unit	99.993.592,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.	16.	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfo kab. Inhil	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	74 Persen	2.434.493.768,00	
					Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	50 Persen		
2.	16.	03.	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang di kelola	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	612.999.887,00	
2.	16.	03.	2.01.	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Domain	50.000.000,00
2.	16.	03.	2.01.	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Dokumen	363.000.044,00
2.	16.	03.	2.01.	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	17 Unit	199.999.843,00
2.	16.	03.	2.02.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	90 Persen	1.821.493.881,00
2.	16.	03.	2.02.	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
2.	16.	03.	2.02.	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	30.000.000,00
2.	16.	03.	2.02.	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Unit	50.000.000,00
2.	16.	03.	2.02.	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	1.081.493.975,00
2.	16.	03.	2.02.	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Unit	30.000.000,00
2.	16.	03.	2.02.	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Layanan	50.000.000,00
2.	16.	03.	2.02.	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Master plan Smart City	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	5 Dokumen	250.000.000,00
2.	16.	03.	2.02.	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	149.999.906,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	16.	03.	2.02.	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Dokumen	30.000.000,00
2.	16.	03.	2.02.	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
2.	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota		394.299.000,00
2.	20.	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	394.299.000,00
2.	20.	02.	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	394.299.000,00
2.	20.	02.	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	242.259.000,00
2.	20.	02.	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	5 Orang	50.000.000,00
2.	20.	02.	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	25 Dokumen	50.000.000,00
2.	20.	02.	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit	52.040.000,00
2.	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota		447.719.000,00
2.	21.	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	37 Persen	447.719.000,00
2.	21.	02.	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	437.719.000,00
2.	21.	02.	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	10.000.000,00
2.	21.	02.	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	10.000.000,00
2.	21.	02.	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	357.719.000,00
2.	21.	02.	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan,	5 Perangkat	60.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi	Tembilahan Kota	Daerah	
2.	21.	02.	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persen	10.000.000,00
2.	21.	02.	2.02.	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Perangkat Daerah	10.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat dengan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 yang dijadikan prioritas dan indikasi perumusan atau penyusunan kegiatan program Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar di kedepankan.

Penyusunan Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Pada Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah dijabarkan beberapa isu-isu penting atau strategis perihal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, oleh karenanya diharapkan rencana yang telah disusun atau dirumuskan ini dapat mengatasi atau mengurangi kendala-kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, dan dengan spirit perubahan kearah yang lebih baik, pada akhirnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian

dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat segera terealisasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ini dibuat, untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada Tahun 2024.

Tembilahan, Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian Dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir



Trio Beni Putra, SE, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19751126 199802 1 001